

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

---

---

**IMPLEMENTASI FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGAWASAN  
LIMBAH PABRIK KARET**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**RIYAN HIDAYAT**  
**NPM : 137310527**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyan Hidayat  
NPM : 137310527  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2018  
Pelaku Pernyataan,



Riyan Hidayat

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet”** dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan usulan penelitian ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkopeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis

menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak H Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si Selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam meyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan penulisan Skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya didalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril.

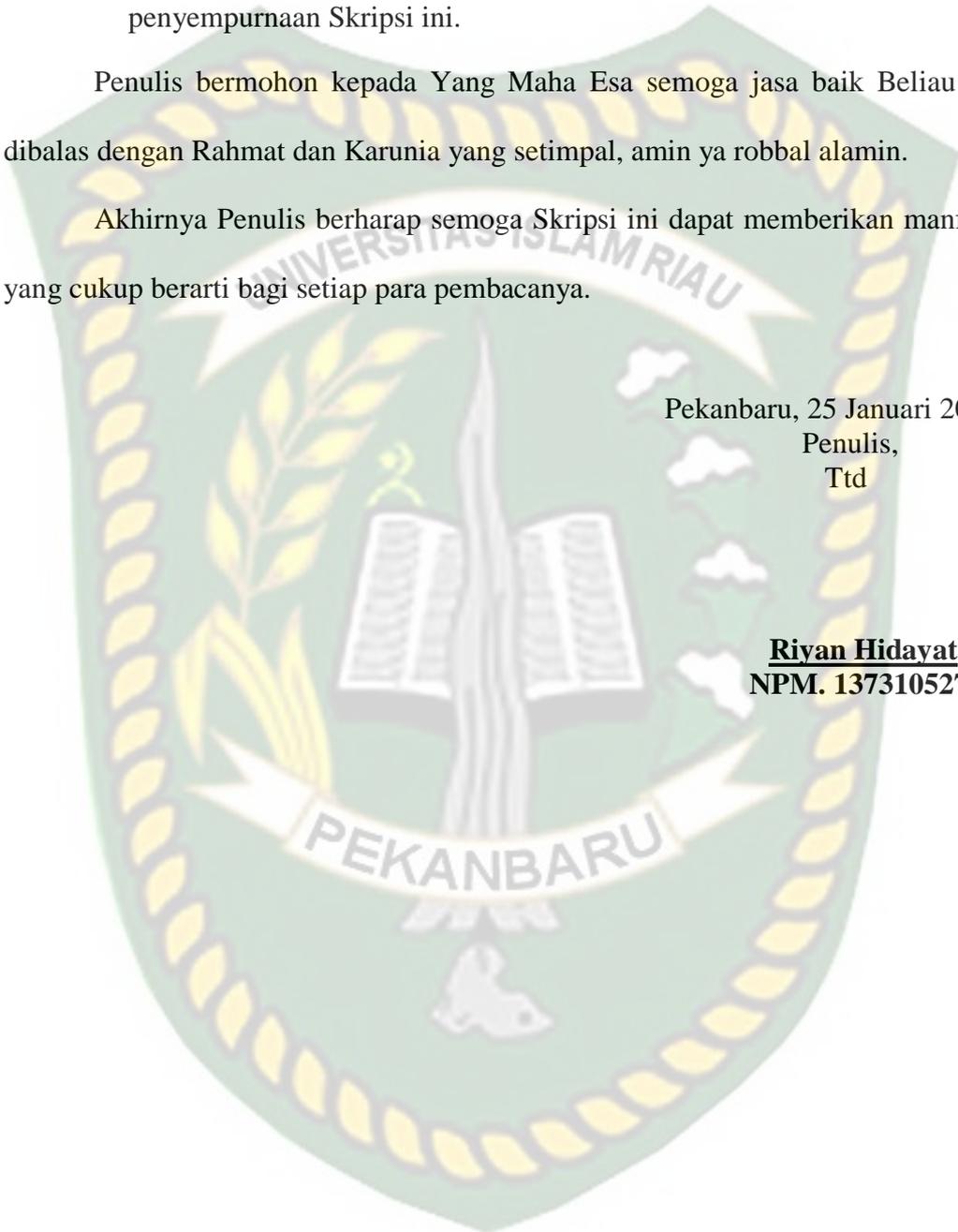
8. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang telah bersedia memberikan tanggapannya kepada penulis yang bermanfaat di dalam penyempurnaan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 25 Januari 2019  
Penulis,  
Ttd

**Riyan Hidayat**  
**NPM. 137310527**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Konsep Pemerintahan.....	17
2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah .....	19
2.2 Asas Demokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan .....	20
3. Konsep Kinerja Pemerintahan.....	23
4. Konsep Pemerintahan Daerah.....	24
5. Konsep Pelaksanaan/Implementasi .....	24
6. Konsep Pengawasan.....	28
6.1 Teknik Pengawasan.....	29
6.2 Efektivitas Pengawasan.....	30
7. Konsep Lingkungan .....	30
B. Kerangka Pikir .....	32
C. Konsep Operasional .....	33
D. Operasional Variabel.....	34
E. Teknik Pengukuran .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40

C. Populasi dan Sampel .....	40
D. Teknik Penarikan Sampel .....	41
E. Jenis dan Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	44
I. Rencana Sistemanis Laporan Penelitian .....	45
 <b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru .....	46
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	46
2. Pemerintahan Kota Pekanbaru .....	47
B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .....	49
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	50
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet .....	53
1. <i>Communication</i> .....	54
2. <i>Resources</i> .....	60
3. <i>Disposision</i> .....	64
4. <i>Bereaucratic Structure</i> .....	69
C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet .....	73
D. Faktor Penghambat yang dialami oleh DLHK tentang Implementasi Fungsi DLHK Kota Pekanbaru terhadap pengawasan Limbah Pabrik Karet .....	74
 <b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Getah Karet.	35
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Getah Karet.	41
III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Impelementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Getah Karet.	45
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	51
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	52
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	53
V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat ( <i>Communication</i> )	55
V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat ( <i>Resources</i> )	61
V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat ( <i>Disposition</i> )	66
V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat ( <i>Bereaucratic Structure</i> )	70
V.8 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggpan Responden Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Kuisisioner Untuk Masyarakat dengan judul Penelitian tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	83
2	: Kuisisioner Wawancara Penelitian tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet (Kepala Dinas DLHK)	90
3	: Kuisisioner Wawancara Penelitian tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet (Humas Perusahaan)	92
4	: Rekap Telly Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet (Masyarakat)	94
5	: Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	96
7	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	102
8	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	103
9	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru terkait tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	104
10	: Surat Keterangan Balasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet	33
IV.I	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	49



# **IMPLEMENTASI FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH PABRIK KARET**

## **Abstrak**

Oleh  
Riyan Hidayat

**Kata Kunci** : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melakukan pengawasan limbah pabrik karet. Indikator dari penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bidang Hukum dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Humas PT. Ricry, Humas PT. P&P Bangkinang, dan Masyarakat disekitar pabrik. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah tehnik sampling jenuh untuk populasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bidang Hukum dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Humas PT. Ricry, Humas PT. P&P Bangkinang dan teknik accidental sampling untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet berada pada interval penilaian “Cukup Terlaksana”.

**IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENT AND CLEAN  
ENVIRONMENT FUNCTION OF PEKANBARU CITY TO WASTE  
SUPERVISION OF RUBBER FACTORY**

***Abstract***

By  
Riyan Hidayat

***Keywords:*** *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

*This study aims to analyze the extent to which the Implementation of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service Functions Towards Rubber Plant Waste Supervision, as well as to find out the constraints faced by employees of the Environment and Hygiene Service in monitoring rubber factory waste. The indicator of this research is Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. This type of research located in the Environmental and Hygiene Department is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives in the researched location. The population used in this study is the Head of the Pekanbaru City Environmental and Hygiene Service, the Law and Supervision Division of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service, Public Relations of PT. Ricry, Public Relations of PT. P & P Bangkinang, and the community around the factory. The sampling technique used in setting individual samples is saturated sampling technique for the population of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service Head, the Law and Supervision Division of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service, Public Relations of PT. Ricry, Public Relations of PT. P & P Bangkinang and accidental sampling techniques for the community, the types and techniques of data collection used in this study consisted of, primary data were collected using questionnaires and interviews as well as secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use frequency table tools. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Implementation of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service Functions on Rubber Factory Waste Supervision was at the "Enough Enforced" assessment interval.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk kesatuan dan republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam UUD 1945, Dimana dalam isisnya yaitu dikatakan bahwa, Keberadaan Negara Indonesia tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam Syafiie 2010 : 79).

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang didalam pembahasan perundang-undangan yang dibahas pada Dasar Negara dimana dalam pembahasan tersebut khususnya pada alinea Ke-Empat yaitu berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang diharapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003:7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara berdaulat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang di tetapkan dalam perundangan tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa penyelenggaran pemerintahan yang ada di daerah diperuntukkan untuk mempercepat pelaksanaan perwujudan pembangunan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri, peningkatan daya saing antara masing-masing daerah, pemerataan pembangunan, pelaksanaan keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tentunya dalam peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan mengenai pemerintahan Daerah tidak lepas dari ruang lingkup Desentralisasi, dan menurut pembahasan pada perturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, dijelaskan tentang Desentraliasi yang mana hal ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang ada di pusat, kepada pemerintah yang ada di Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah Pelimpahan sebagian urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi Vertikal di Wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Pemberian urusan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya di atur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Tahun 2018, dimana hal ini membahas tentang:

1. Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Terhadap Kepada Daerah seperti Gubernur.
2. Selain kepada Gubernur, Sebagian urusan Pemerintah juga dapat diberikan kepada.
  - a. Instansi Vertical.
  - b. Pejabat Pemerintahan Daerah.

Dimana pelayanan yang diberikan atas perintah diatas dapat melampaui atau melalui lebih dari satu wilayah administrasi di dalam satu provinsi. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otomoni nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senjatanya telah ada dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otomoni daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otomoni yang bertanggung jawab adalah otomoni yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otomoni, yang pada dasarnya untuk pemberdayaan daerah

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional yang telah di tetapkan.

Dimana dalam melaksanakan penelitian pada pembahasan yang penulis susun, penulis mencoba melakukan penelitian dengan melibatkan Pemerintah di Kota Pekanbaru, khususnya Dinas DLHK Kota Pekanbaru, dimana DLHK memiliki Tupoksi untuk menjalankan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Selain daripada hal tersebut, berdasarkan Perda/Walkot yang dibuat dengan Nomor Urut 103/2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota, adapun Tugas Dan Fungsi Dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut ini:

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Bab IV Pasal 4 disebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.
2. Perangkat Pemerintah DLHK Pekanbaru, dibebankan tugas yaitu untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah Provinsi Riau. DLHK dalam menjalankan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kegiatan teknis pada bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru.

- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan di bidang kegiatan kerjaDLHK .
- c. Merealisasikan kegiatan yang menjadi kerja pokok dinas lingkungan hidup dan kebersihan.
- d. Melakukan Pekerjaan dalam menyusun serta merencanakan teknis pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan DLHK.
- e. Penyelenggaraan dibidang pelayanan masyarakat dan pelayanan teknis Dibidang DLHK.
- f. Menjalankan kegiatan pada bidang kehutanan, serta bidang konservasi alam dan hayati serta ekosistemnya.
- g. Penetapan serta pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- h. Pembinaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kontek DLHK.
- j. Pemberian arahan serta proses binaan di lingkungan DLHK Kota Pekanbaru.
- k. Pengelolaan Keuangan Dinas.
- l. Pelaksanaan pekerjaan lainnya sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas DLHK Pekanbaru.

Dari 12 (dua belas) fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yang terkait dengan masalah llimbah pabrik adalah pada pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiayan bidang lingkungan hidup dan kebersihan,

karena limbah yang dihasilkan dapat merusak lingkungan dan polusi udara terutama.

Dan adapun bidang-bidang program yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yang membahas tentang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Bidang Tata Lingkungan. Fungsi dari Bidang Tata Lingkungan adalah:
  - a. Pelaksanaan Penyusunan, Pengesahan, Pemantauan dan Evaluasi kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana pelaksanaan ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru.
  - b. Menjalankan proses koordinasi dalam instrument pencegahan sebuah bencana seperti pencemaran dan kehancuran lingkungan khususnya di Kota Pekanbaru.
2. Seksi Kajian Dan Evaluasi Dampak Lingkungan, yang memiliki fungsi:
  - a. Penyusunan Bahan Kebijakan Dan Pengembangan Pedoman instrument serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerusakan dilingkungan (lingkungan hidup) ataupun resiko pada kerusakan lingkungan hidup.
3. Bagian dari Tugas Bidang Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - a. Melakukan Proses Pemantauan Kualitas Lingkungan Seperti Udara, Tanah, Air, Dll.
  - b. Pelaksanaan Pemantauan, Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran.

- c. Menjalakan proses Sosialisasi Serta mutu dari kondisi lingkungan. (Air, Udara, Tanah). Khususnya di Kota Pekanbaru.
  - d. Melaksanakan Bimbingan teknis pengendalian pencemaran Air, Udara dan Tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan.
4. Seksi Pemantauan Lingkungan.
    - a. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara.
  5. Tugas Dari SDM Penataan serta Peningkatan Kualitas Hidup.
    - a. Pengembangan system informasim, menerima saran dan kritik dari masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang terjadi dilingkungan mereka. Khususnya terkait dengan proses atau kegiatan yang tidak memiliki izin.
  6. Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
    - a. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi lingkungan hidup DLHK Pekanbaru.
    - b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan system informasi lingkungan hidup berbasis web.
    - c. Perencanaan, penyiapan bahan dan penerbitan bulletin/majalah informasi lingkungan.
  7. Seksi Pelaksanaan Hukum.
    - a. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan melaksanakan penegakan proses hukum dan perlindungan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencemarah ataupun kegiatan yang merusak lingkungan

hidup khususnya di Kawasan Kota Pekanbaru yang ramai terhadap lingkungan masyarakat.

Limbah merupakan hasil sisa dari sebuah proses yang tidak dapat digunakan kembali, apabila limbah ini terlalu banyak dilingkungan maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Limbah dibagi menjadi dua bagian sumber yaitu limbah yang bersumber domestik (limbah rumah tangga) dan limbah yang berasal dari non-domestik (pabrik, industri dan limbah pertanian). Bahan-bahan yang termasuk dari limbah memiliki karakteristik diantaranya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, memiliki bau yang menyengat dan lain-lain. Dari sifat yang dikandung limbah cukup berbahaya, oleh karena itu, begitu pentingnya terutama perusahaan untuk memperhatikan dalam membuang limbah yaitu sesuai dengan prosedur agar tidak membahayakan lingkungan.

Dari pengertian lingkungan yaitu berupa tempat dimana setiap makhluk flora, fauna dan manusia saling membutuhkan, maka tugas kita untuk menjaga kelestarian lingkungan ini agar tidak rusak. Karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada kelestarian hidup dan juga akan dapat berakibat kepunahan makhluk hidup, tidak hanya flora dan fauna tetapi juga manusia.

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik karet terbagi menjadi empat macam, yakni limbah pra produksi dari kebun karet, limbah produksi tanaman karet, Tetapi yang terjadi pada salah satu pabrik karet yang ada di kota Pekanbaru membuang limbah tidak kelola dengan baik, seperti ketika air sungai pasang, saat

itulah perusahaan mengambil kesempatan membuang limbahnya kesungai Siak. Akibatnya, jika air sudah tercemar maka habitat yang ada di air seperti ikan tidak akan bisa berkembang, dan akan mengalami kepunahan, tidak hanya itu bau dari limbah yang dihasilkan sangat mengganggu masyarakat sekitar. (<http://datariau.com/lingkungan/sekian-lama-beroperasi-di-pekanbaru-pabrik-karet-pt-ricry>, di akses 20 Mei 2018, 22.17 Wib).

Dari dampak buruk yang terjadi di sekitar lingkungan, maka sangat diperlukannya menjaga lingkungan hidup dengan melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, dengan cara tidak merusak lingkungan dengan membuang limbah sembarangan, dan kelola limbah dengan cara peralatan yang canggih dan aman sehingga lingkungan tetap terjaga dengan keasriannya.

Ada dua perusahaan yang bergerak pada pabrik karet yaitu PT. Ricry dan PT P&P Bangkinang. PT Ricry ini berlokasi di jalan Kampung Sukaramai No. 63, Pekanbaru, Riau dan didirikan pada tanggal 28 Februari 1969. Sedangkan PT. P&P Bangkinang berada di Jalan Taskurun No. 9, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan didirikan pada tanggal 10 Januari 1970, dan ke dua pabrik ini berada di tengah kota.

Dalam prosesnya dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat terkadang mengeluhkan bau busun yang dihasilkan dari pengelolaan pabrik karet yang ada di areal kawasan padat penduduk, Selain itu pengendalian pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah karet perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk dipelajari agar tingkat pencemaran limbah yang di buang ke perairan berada dibawah baku mutu lingkungan (BML) yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan

penanganan yang terpadu antara pihak pemerintah, industri dan masyarakat, juga di perlukan teknologi pengolahan limbah karet yang murah dan murah dalam penanganannya, seperti melalui proses aerasi dan koagulasi.

Pengendalian pencemaran dari limbah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelamatkan kelestarian sungai, maka di buat parameter pada sungai siak. Hal ini untuk mengukur baku mutu air yang ada di sungai siak tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus tegas dalam meningkatkan kesadaran mematuhi peraturan yang ada, dan menindak lanjuti bagi pihak industri yang melanggar peraturan dengan tidak memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

Selain dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru juga diharapkan upaya dari Pihak Industrinya atau Perusahaannya, yaitu juga memperhatikan lingkungan sekitar dari dampak yang dihasilkan oleh Perusahaan tersebut, yaitu dengan mengadakan pengelolaan limbah karet dengan teknologi dan juga memberikan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar serta masyarakat yang berada di ruang lingkup perusahaan.

Dari proses Observasi yang telah penulis laksanakan di lapangan, yang mana memberikan fakta bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik karet yang ada di kota pekanbaru mengaku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terkait bau yang di hasilkan dari pabrik yang beroperasi di lingkungan mereka, dan mereka sudah berulang kali melakukan protes kepada lurah di tempat mereka tinggal, tapi tidak pernah mendapatkan hasil yang dapat memuaskan mereka, pencemarah udara yang di hasilkan oleh pabrik karet yang ada di kota

pekanbaru memang sudah sangat lama terjadi dan masyarakat pun sudah menjadi terbiasa dengan polusi tersebut tanpa menyadari bahwa bahaya jangka panjang terhadap kesehatan tubuh mereka sedang terancam.

Penulis juga mengamati media-media cetak maupun online yang ada di pekanbaru terkait pencemaran limbah pabrik karet dan berita tentang pencemaran limbah pabrik karet di pekanbaru sudah sangat banyak di soroti dan di angkat kepermukaan, akan tetapi tidak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kota pekanbaru, terlebih lagi dari DLHK Pekanbaru (Pemerintah Kota Pekanbaru) yang mana dalam penelitian ini menjadi focus peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun beberapa berita yang penulis dapatkan dari media adalah:

Datariau.com memberitakan bahwa keberadaan PT. Riau Crumb Rubber Factory (Ricry) di Jalan Nelayan, Rumbai Kota Pekanbaru, selama ini dirasakan tak banyak memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Bahkan berpuluh tahun lamanya warga Rumbai dan sekitarnya harus menghirup aroma tak sedap dari perusahaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ali Akbar, warga Rumbai Pekanbaru. Dia secara keras mengutuk atas ketidakpedulian perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan karet mentah itu, terhadap dampak kesehatan lingkungan yang dirasakan warga sekitar.

Dari hasil pemberitaan yang telah penulis dapatkan dari media-media di kota Pekanbaru, dimana dalam pemberitaan tersebut diatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik karet melakukan kegiatan industrinya merasa terganggu dengan proses aktivitas pabrik tersebut, terlebih mereka merasa pemerintah memberikan izin operasional terhadap pabrik tersebut, dimana

seharusnya izin operasionalnya sudah seharusnya di cabut dan pabrik tidak dapat lagi melakukan aktivitas produksi.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, sebelumnya warga disekitar pabrik sudah pernah melakukan protes kepada pihak Pemerintah ataupun perwakilan dari manajemen pabrik, tetapi pada kenyatannya, apa yang dilakukan masyarakat tidak mendapatkan hasil, dan sampai saat ini proses produksi dari pabrik karet terus berjalan.

Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPRD, yaitu Bpk Albaiza SH, MH memberikan pernyataan bahwa Pabrik karet tersebut sebenarnya sudah tidak layak lagi beroperasi, terlebih lokasi pabrik tersebut memang benar-benar berada di kawasan perumahan dan padat penduduk.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, dengan demikian maka penulis menemukan permasalahan yang bisa diangkat menjadi fenomena, dimana fenomena di lapangan yang mana hal ini terkait dengan pencemaran lingkungan khususnya udara yang di akibatkan oleh pabrik karet yang ada di pekanbaru. Dan adapun fenomena-fenomena yang berhasil penulis temui dari fungsi pengawasan yang di emban oleh pihak pemerintah kota Pekanbaru melalui DLHK adalah sebagai berikut:

1. Kurang Optimalnya pengelolaan limbah pabrik karet yang ada di kawasan Kota Pekanbaru, sehingga mencemari lingkungan dan mengganggu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pabrik beroperasi.

2. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah melalui perangkat kerjanya yaitu Dinas-Dinas seperti DLHK Kota Pekanbaru terhadap pembuangan limbah industry dari Pabrik Karet tersebut.

Berdasarkan fenomena atau penjelasan yang telah disampaikan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan proses penelitian terkait dengan pelaksanaan pengawasan limbah industry pabrik karet yang ada di Kota Pekanbaru dengan mengangkat judul penelitian: ***“Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Pabrik Karet.”***

#### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan terkait pengolahan limbah karet di kota pekanbaru khususnya terkait industry Pabrik Karet yang beroperasi sudah cukup lama di kota Pekanbaru memang terkesan kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pekanbaru, hal ini dapat di buktikan dengan fakta bahwa pabrik karet yang ada di kota Pekanbaru sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk beroperasi karna memang di jalankan di tengah kawasan padat penduduk. Dan seperti yang telah dijelaskan dari fenomena dan gejala tersebut, dengan demikian penulis melakukan perumusan terhadap masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pengawasan terhadap operasional pabrik karet yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dimana permasalahan yang berhasil penulis rumuskan adalah: **“Bagaimana Hasil Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan**

## **Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet?’’**

### **C. Tujuan Penelitian**

Didasari oleh penyajian permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Berguna untuk mengetahui Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pihak DLHK sebagai pelaksana kebijakan yang tunjuk dalam melakukan pengawasan terhadap limbah Pabrik karet.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis, Diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi acuan untuk perkembangan ilmu, khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan, setidaknya pada bidang-bidang inventaris yang membahas tentang kajian-kajian Ilmu Pemerintahan pada umumnya.
2. Tujuan akademisnya adalah, dimana hasil dari proses penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan penyedia informasi terhadap adik-adik dimasa yang akan datang, khususnya yang melakukan penelitian dibidang yang sama tentunya. Seperti penelitian tentang pengawasan dan penertigan pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi dan operasional pabrik karet yang

menjalankan kegiatannya di tengah-tengah perkotaan, seperti yang penulis teliti saat ini.

3. Praktis, dengan didapatkannya hasil pada proses penelitian ini, nantinya diharapkan mampu menjadi sebuah bahan informasi bagi pembaca dan juga menjadi sebuah masukan untuk pihak Pemerintah khususnya Pemkot Kota Pekanbaru dibidang Pelaksanaan pengawasan Pencemarah Lingkungan yang diakibatkan operasional Pabrik Karet.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

#### **1. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan. Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan serta semua bagian element yang mendukung lainnya.

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Ndraha (2003;6), menjelaskan bahwa pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

## **2. Konsep Pemerintahan.**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Yusri Munaf, 2016:47)

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarkhi dan republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republic, pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "*Il Principe*". Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Yusri Munaf, 2016:47)

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh

pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

## **2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Menurut perspektif Kybernologi, Ndraha (2005;192) Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat. Dibentuknya suatu system pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan Civil termasuk layanan birokrasi.

Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu. Dimana pemerintahan mempelajari bagai mana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

## **2.2 Asas Demokrasi dan Asal Tugas Pembantu dalam Penyelenggaraan Pemerintah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Demokrasi dan tugas pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di selenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asal desentralisasi, disamping itu sebagai konsekuensinya Negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan seklipun kepada daerah.

Pelaksanaan asal dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan di daerah atau di Provinsi, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku walil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam membina dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara kesatuan repunlik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah di daerah;

- d. Teridentifikasinya potensi dan terpilihnya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengolahan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari system dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang member penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asal desentralisasi dan asal dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, pengolahan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (PP7/2008), Meliputi:

- a. Pelimpahan Urusan Pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 Meliputi:

- 1) Prinsip Pendanaan.
- 2) Perencanaan dan penganggaran.
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggung jawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan Dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Penugasan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara penugasan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggung jawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan pasal 11 PP/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur, (2) selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula di limpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat pemerintahan daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

### **3. Konsep Kinerja Pemerintahan**

Suprihanto (2003;33) menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang di capai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan,

misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang terlebih dahulu dan telah di sepakati bersama.

Keith daxis (1992;228) merumuskan ada 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi yaitu: kecerdasan, kedewasaan, keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan komunikasi.

#### **4. Konsep Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas otonomi dan asas tugas pembantuan, asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system NKRI. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertical di wilayah tertentu (Pasal 1 ayat 8). Adapun hal-hal yang dapat di laksanakan dengan tugas pembantuan adalah:

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat;
2. Urusan secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat;
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah;
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.

## **5. Konsep Pelaksanaan/Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majoe dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (dalam Usman. 2002:70)

Menurut Wahab (2001: 65), Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Harsono, 2002:67), mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004:158).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Edward mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu factor *Communication*, *Resources*, *Disposition*, dan *Bureucratic Struktur* (Edward dalam Widodo, 2011;96-110).

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

### 3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel

## **6. Konsep Pengawasan**

Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167). Langkah-langkah tersebut di ilustrasikan dan dijelaskan dalam gambar berikut ini :

- a. Menetapkan Standar
- b. Mengukur Kinerja
- c. Membandingkan Kinerja Dengan Standar
- d. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif.

Menurut Silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang di capai dengan standart organisasi.

### **6.1 Teknik Pengawasan.**

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturanperaturan dan kebijakswanaan-kebijksanaan yang telah di tetapkan”. Nawawi (1989:15)

Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi: (a) Pemantauan, (b) Pemeriksaan, (c) Penilaian, dan (d) Perbaikan.

- a. Pemantauan
- b. Pemeriksaan
- c. Penilaian
- d. Perbaikan

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tetapkan, Siswanto (2013;140) menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar metode untuk pengukuran kinerja.
2. Mengukur Kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

## **6.2 Efektifitas Pengawasan**

Handoko (2009;366) mengatakan ada beberapa factor yang membuat pengawasan semakin diperlakukan oleh setiap organisasi factor-faktor itu adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang di ciptakan perubahan perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. System pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan kesalahan tersebut sebelum menjadi krisis.

4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Tanpa system pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

## 7. Konsep Lingkungan

Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut No 23 tahun 2007 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Unsur Hayati (Biotik) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.
2. Unsur Sosial Budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.
3. Unsur Fisik (Abiotik ) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.

Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi.

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup lain. Ruang merupakan suatu tempat berbagai komponen lingkungan hidup menempati dan melakukan proses, sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (Adi Asmara:2008).

Lingkungan adalah faktor eksternal yang perkembangan manusia dan mencakup antara lain lingkungan sosial, status ekonomi dan kesehatan (Bagja Waluya:2010). Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu lingkungan fisik (*Physical environment*), lingkungan Biologis (*Biological environment*), dan lingkungan sosial (*Social Environment*).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk materi seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan jasad renik dan lain sebagainya, sedangkan lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian dan lain sebagainya.

Manusia tidak hanya tertarik kepada tanggapan dan penyesuaian terhadap lingkungan fisikalnya tetapi juga tertarik kepada interaksinya dengan manusia lain yaitu ruang sosialnya. Dinamika yang terdapat dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan penyesuaian dan pembaharuan sikap dan tindakan terhadap

lingkungan di mana manusia itu hidup. Di pihak lain lingkungan fisikalnya di mana manusia itu hidup dapat mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang disebabkan oleh campur tangan manusia (Bintarto dan Surastopo, 1991: 22).

## B. Kerang Pikiran

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.**



Sumber : Teori Implementasi Kebijakan Edward (dalam Widodo, 2011;96-110)

### C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntutan dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan.
3. Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan diterapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.
4. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah di kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.
5. pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.
6. Indikator dari Impelentasi Adalah:
  - a. Communication (Komunikasi

- b. Resources (Sumber Daya)
- c. Disposition (Disposisi)
- d. Bureucratic Structure (Struktur Birokrasi)

#### D. Operasional Variabel

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono, (2005:38).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian tentang Impelementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Getah Karet. Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.I di bawah ini:

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan diterapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang	Implementasi Fungsi DLHK.	1. <i>Communication</i> (komunikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Sosialisasi kepada Perusahaan Pabrik Karet di Kota Pekanbaru terkait dampak lingkungan yang di timbulkan dari limbah produksi pabrik.</li> <li>b. Melakukan Koordinasi dengan pihak masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan Pabrik Karet ber produksi.</li> </ul>	Nominal

strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula. Edward (dalam Widodo 2011;90)	2. <i>Resources.</i> (Sumber Daya)	a. Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang mampu melakukan fungsi pengawasan DLHK.  b. Sumber Daya Anggaran untuk menjalankan kebijakan dari DLHK.	Nominal
	3. <i>Disposition</i> (posisi)	a. Komitmen DLHK untuk melakukan kajian tentang Pencemaran Lingkungan.  b. Komitmen DLHK untuk melakukan pengawasan terkait dari dampak lingkungan yang di timbulkan oleh Pabrik Karet.	Nominal
	4. <i>Bureucratic Structure</i> (struktur Birokrasi)	a. Memiliki unit kerja yang menangani masalah di bidang pencemaran lingkungan dari pabrik karet.  b. Pemberian Sanksi Kepada Pabrik Karet.	Nominal

Sumber : Olahan Penulis tahun 2018

### E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel dalam pengerjaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet Mencapai Presentase 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet Mencapai Presentase 34% - 100%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet Mencapai Presentase 33% - 100%

#### **A. *Communication* (Komunikasi)**

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator *Communication* (Komunikasi) berada pada 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator *Communication* (Komunikasi) berada skala 34%-100%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator *Communication* (Komunikasi) berada skala 33%-100%.

#### **B. *Recources* (Sumber Daya).**

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator *Recources* (Sumber Daya) berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator *Recources* (Sumber Daya) berada pada skala 34%-100%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator *Recources* (Sumber Daya) berada pada skala 33%-100%.

### **C. Disposition (Disposisi).**

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposition (Disposisi) berada pada skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposition (Disposisi) berada pada skala 34%-100%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposition (Disposisi) berada pada skala 33%-100%

### **D. Bureucratic Structure (Struktur Birokrasi).**

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Bureucratic Structure (Struktur Birokrasi) berada pada skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Bureucratic Structure (Struktur Birokrasi) berada pada skala 34%-100%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Bureucratic Structure (Struktur Birokrasi) berada pada skala 33%-100%

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah yang di hasilkan oleh pabrik karet di Kota Pekanbaru.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram sangat memudahkan untuk di baca.

## **B. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru khususnya lokasi di daerah Kota Pekanbaru dimana pabrik karet melakukan aktivitas produksinya.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait kurang terlaksananya pengawasan, pemberian tindakan sanksi, dan juga kajian tentang pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

## **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:90).

Populasi adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Bidang Tata Lingkungan (DLHK) Kota Pekanbaru, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Dan populasi selanjutnya adalah di ambil dari bagian masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik karet beridiri dan melakukan aktivitas produksinya.

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase(%)
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Bidang Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru..	1	1	100%
3	Humas PT. Ricry	1	1	100%
4	Humas PT. P&P Bangkinang	1	1	100%
5	Masyarakat di sekitar Pabrik	~	20	~
<b>Jumlah</b>		~	<b>24</b>	~

*Sumber : Olahan Penulis tahun 2017*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Menurut (Sugiyono,2011;91). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Tekhnik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Humas PT. Ricry dan Humas PT. P&P Bangkinang, digunakan tekhnik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

- b. Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik karet penulis menggunakan Teknik accidental sampling, pemilihan sample secara kebetulan atau aksidental, juga disebut pemilihan sample konvenien (ocnvenience sampling), merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada dijumpai di sekitar pabrik melakukan operasi produksinya, Sehingga Sampel Penelitian ini secara keseluruhan berjumlah sebanyak 20 Orang Responden Masyarakat.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data diantaranya adalah:

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden;
- b. Tanggapan responden tentang Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.
- d. Dan Data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Getah Karet.

- b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan.

- c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan

penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel).Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif Deskriptif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jadwal kegiatan penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2018 bulan Juli dan akan berakhir di tahun 2018 bulan DesemberAdapun rinciannya sebagai berikut

**Tabel III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																								
2	Ujian Proposal							■																					
3	Revisi Proposal								■	■	■																		
4	Kuisisioner											■																	
5	Rekomendasi survey												■																
6	Survey Lapangan													■	■														
7	Analisis data															■	■												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																■	■	■										
9	Konsultasi Revisi Skripsi																			■									
10	Ujian Konferehensif Skripsi																				■	■							
11	Revisi Skripsi																							■	■				
12	Pengandaan Skripsi																								■	■			

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

## **2. Pemerintahan Kota Pekanbaru**

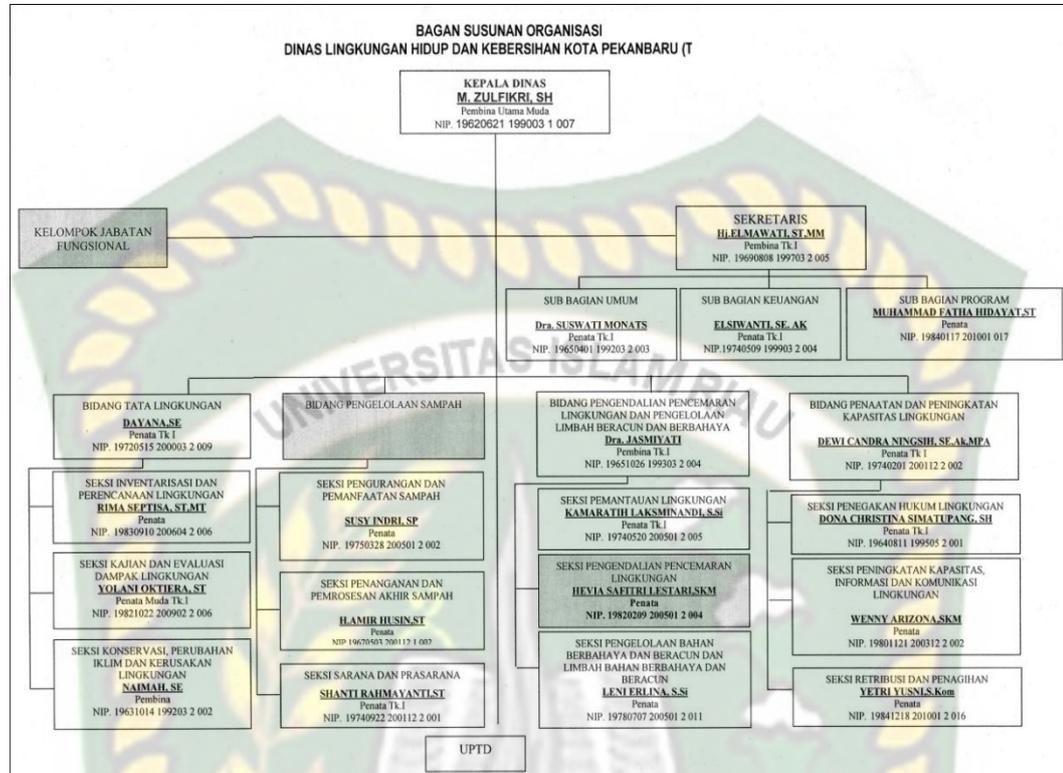
Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuh Baru Barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkerang Utara dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur dan Kelurahan Wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan

Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura.

## B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Identitas Responden**

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Humas PT. Ricry, Humas PT P&P Bangkinang, serta melakukan penyebaran kuesioner masyarakat di sekitar pabrik yang berjumlah 20 orang.

Sehubungan dengan penelitian Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet, di perlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

#### **1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Penelitian tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet, selain melakukan wawancara juga digunakan dengan cara penyebaran kuesioner, oleh karenanya sangat di perlukan penulis mengetahui identitas masyarakat yang ada disekitar perusahaan terutama sekitar pabrik PT. Ricry, PT. P&P Bangkinang.

Untuk pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	11	55%
2	Perempuan	9	45%
	Jumlah	20	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat sebagai yang ada di sekitar pabrik dijadikan sebagai sampel dalam penelitian membahas tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 11 orang dengan persentase (55%) dari Total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden, dan jumlah responden peserta perempuan berjumlah 9 orang dengan persentase (45%) dari total keseluruhan 20 Orang responden yang ada disekitar pabrik karet.

## **2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet, serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada masyarakat yang menjadi responden, karena usia sangat ditentukan dalam

kematangan dalam menilai, dan tentunya usia yang dipilih adalah masyarakat yang memiliki pemikiran yang sehat dan sudah memiliki keputusan dalam hidupnya. Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia masyarakat yang di jadikan responden:

**Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
Satu	20-30 Tahun	7	35%
Dua	31-40 Tahun	8	40%
Tiga	41-50 Tahun	5	25%
Empat	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		20	100%

*Oalahan 2018*

### **3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet, serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampiannya

atau komunikasi akan berbeda dengan masyarakat yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan dalam bentuk Tabel:

**Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Masyarakat**

No	Klasifikasi	Jumlah	Persenan
Satu	Sekolah Dasar	Nol	Nol %
Dua	Sekolah Menengah	2	10%
Tiga	Sekolah Atas	11	55%
Empat	D3	0	0%
Lima	Strata Satu	7	35%
Jumlah		20	100%

*Olahan Saya 2018*

Penjelasan yang disajikan pada tabel diatas memberikan gambaran terkait dengan responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet dominan memiliki pendidikan SMA yaitu berjumlah 11 responden dengan persentase (55%), selanjutnya tingkat pendidikan S1 berjumlah 7 responden dengan persentase (35%), dan tingkat pendidikan SMP berjumlah 2 responden dengan persentase.

**B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet**

Pengertian dari observasi adalah bagian dari sebuah proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis, dimana hal ini berkaitan dengan permasalahan pada fenomena yang terjadi, pengamatan yang dimaksud tentunya berkaitan dengan permasalahan tersebut hal ini disampaikan oleh pendapat ahli yaitu Harbani Pasolong (2013 : 131). Jadi observasi dapat di artikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat bagaimana fakta yang terjadi sesungguhnya untuk tujuan melengkapi data konkrit dan di susun

dalam bentuk tabel dan di uraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Dis Posisi, dan tentunya sebuah Struktur Organisasi yang juga disebut dengan kata lain seperti Struktur Birokrasi. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu *communication*, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

### **1. Komunikasi (Communications)**

Artian dari kata komunikasi adalah proses pemberian atau penyampaian dari sebuah komunikator terhadap seorang komunikan, dimana selain itu, komunikasi dalam proses kebijakan berarti memberikan sebuah informasi tentang pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat, kepada seorang implementor. Jadi komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan dengan pemilik Pabrik Karet yang ada di Kota Pekanbaru harus baik dan sejalan. DLHK harus memberitahukan kepada pabrik karet, bahwa mereka harus menjaga kelestarian lingkungan, sehingga aktivitas dari pabrik tersebut tidak mencemarkan lingkungan sekitarnya baik itu dari segi pencemaran udara, air, dan lain lain. Jika pihak dinas sudah memberikan sosialisasi, maka pihak pabrik harus mentaati peraturan tersebut. Dan jika pihak pabrik tidak mentaati semua peraturan yang berlaku maka

dinas harus bertindak cepat tanggap, agar kesalahan tersebut tidak berlarut-larut hingga dapat membahayakan lingkungan sekitar.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang pertama yaitu tentang komunikasi maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket pada tabel dibawah:

**Tabl 5.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator *Communication***

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	TidakTerlaksana	
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada perusahaan pabrik karet di Kota Pekanbaru terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari ilmbah produksi pabrik.	4 (20%)	9 (45%)	7 (35%)	20 (100%)
2	Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat terkait permasalahan yang terjadi dilingkungan pabrik berproduksi	2 (10%)	16 (80%)	2 (10%)	20 (100%)
3	DLHK menanyakan langsung kepada masyarakat	2 (10%)	5 (25%)	13 (65%)	20 (100%)
4	Melakukan koordinasi kepada masyarakat	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>80</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>30%</b>	<b>Seratus</b>

*Olahan Penulis Ne 2018*

Penjelasan pada pembahasan diatas tentunya memiliki hasil dari masing-masing responden dimana hasil paling dominan terhadap indikator pertamayang membahas tentang “*Communication*” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 10 Orang responden dengan persentase (50%), lalu di ikuti dengan jawaban responden peserta pada kategori “Tidak Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 6 Orang responden peserta dengan persentase (30%) sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Terlaksana” rata-rata 4 orang responden dengan persentase (20%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden.

Untuk melengkapi hasil yang penulis dapatkan pada peyajian hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan terhadap masyarakat, dan telah disajikan di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan hasil wawancara yang berhasil penulis lakukan terhadap perwakilan-perwakilan pihak terkait yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini, dimana diantaranya adalah perwakilan dari pihak DLHK PKU, Setelah itu, pembahasan seterusnya adalah keitannya dengan perwakilan dari Perusahaan Pabrik Karet yang berlokasi di Kec.Marpoyan. Dan adapun hasil wawancara yang pertama adalah jawaban yang diberikan oleh pihak Pemerintah yang diamanahkan kepada DLHK Pekanbaru, dalam Hal ini diwakilkan oleh Bapak R.Adrian yang menjabat sebagai Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan, adapun tanggapan beliau adalah sebagai berikut:

*“Pelaksanaan sosialisasi untuk tahun ini belum terlaksana, baik kepada perusahaan ataupun kepada pihak masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan masing-masing perusahaan tersebut, hal ini di sebabkan*

*karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru baru di bentuk dan di sesuaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan berdasarkan penjelasan beliau mengatakan bahwa proses sosialisasi dan juga koordinasi pada tahun ini memang benar belum terlaksana, dan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi di tahun-tahun sebelumnya, beliau juga mengatakan bahwa hal itu tidak diketahui, karna pada dasarnya kegiatan pada tahun sebelumnya tidak ada laporan yang masuk kepada beliau, dan beliau baru menjabat pada tahun 2018". (Wawancara Tanggal 20 September 2018, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru).*

Selain dari hasil wawancara yang diberikan oleh Pemerintah Pekanbaru yang mana dalam hal ini adalah DLHK di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perwakilan Perusahaan Pabrik Karet yang berada di lokasi Kec.Marpoyan, dalam hal ini kegiatan wawancara di wakikan oleh Bapak Yuliarman yang menjabat sebagai Wakil Bidang Manajemen PT.P&P Bangkinang, hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah sebagai berikut:

*"Untuk tahun ini pihak manajemen perusahaan belum pernah menerima kunjungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, khususnya terkait dengan pelaksanaan Sosialisasi mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan perusahaan kami, dan untuk masalah pencemaran lingkungan yang disebutkan, kita pihak perusahaan menyadari bahwa adanya masalah bau udara yang dihasilkan oleh pabrik PT. P&P Bangkinang, tetapi di luar itu kita juga berusaha sekuat tenaga yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan khususnya terkait dengan bau yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan karet di perusahaan ini". (Wawancara Tanggal 24 September 2018, Bapak Yuliarman, Wakil Bidang Manajemen PT. P&P Bangkinang Kota Pekanbaru)*

Selain dari pada penjelasan di atas, pihak perusahaan PT. P&P Bangkinang juga menjelaskan terkait dengan proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan khususnya polusi udara yang di

hasilkan dari proses pengolahan karet diperusahaan tersebut, adapun program-program yang dilakukan oleh Perusahaan PT. P&P Bangkinang berdasarkan hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

*“Untuk komitmen perusahaan terkait dengan pelaksanaan upaya mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan pabrik, kita melakukan upaya-upaya penanaman pohon di sekitaran pabrik yang nantinya berfungsi untuk menyaring polusi udara yang dihasilkan, khususnya terkait dengan bau karet yang di hasilkan, karna pada dasarnya pepohonan yang di tanam dapat mengurangi dampak aroma bau yang dikeluarkan dari pengolahan pabrik. (Wawancara Tanggal 24 September 2018, Bapak Yiliarman, Wakil Bidang Manajemen PT. P&P Bangkinang)*

Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan pada perusahaan pabrik karet yang juga berdiri di Kota Pekanbaru, dimana perusahaan tersebut adalah PT.Riau Crumb Rubber Faktory Pekanbaru, namun pada saat penulis melakukan penelitian ke lokasi pabrik, pihak keamanan pabrik memberikan keterangan bahwa manajemen pabrik sedang mengalami permasalahan internal perusahaan, sehingga aktivitas pabrik untuk sementara waktu sedang diberhentikan, dan seluruh pegawai dan karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut di rumahkan untuk sementara waktu yang belum diketahui kapan akan kembali aktif bekerja.

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses sosialisasi yang seharusnya terjadi dan dijalankan pihak Pemerintah Pekanbaru yaitu pihak dari DLHK Pekanbaru belum terlaksana, sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanganan pencemarah lingkungan khususnya polusi udara yang terjadi di sekitaran pabrik karet yang aktif beroperasi di kota Pekanbaru masih belum ada kejelasan. Di katakan belum terlaksananya sosialisasi itu dilakukan, karena pihak perusahaan

masih belum bisa mengendalikan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Terutama pencemaran udara, yang menimbulkan bau yang sangat menyengat, dan dapat mengganggu kenyamanan bagi aktivitas masyarakat.

Selain itu penulis menjelaskan maksud dari koordinasi dengan pihak masyarakat ini maksudnya adalah, dengan bekerja sama antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan masyarakat setempat untuk mengingatkan perusahaan, atau melakukan aksi dalam rangka positif terhadap ketidaknyamanan perusahaan tersebut. Jadi pihak Dinas Lingkungan dan Kebersihan berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat setempat seperti Ketua RT/RW nya, lembaga-lembaga yang ada kawasan perusahaan, ataupun ketua pemuda sebagai penggerak masyarakat agar jangan tinggal diam atas kegiatan perusahaan yang sudah meresahkan masyarakat. Dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihanpun harus bersikap tegas terhadap perusahaan jika mereka tidak menaati peraturan.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan indikator yang ke 2 (dua) dimana penulis akan membahas tentang sumber daya, dan untuk penelitian tersebut, penulis juga akan menyajikan hasil penyebaran kuesioner penulis dengan masyarakat dan juga hasil wawancara penulis dengan perwakilan masing-masing manajemen perusahaan dan pihak Pemerintah yang diwakilkan oleh DLHK Pekanbaru, untuk memahami hasil perolehan penulis dapatkan dilapangan, maka penulis akan menyajikan masing-masing hasil yang penulis dapatkan terkait dengan indikator yang ke dua seperti di bawah ini:

## 2. *Resources* (Sumber daya)

Adapun maksud dari kata sumberdaya yang ditulis diatas adalah berkaitan dengan apa yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan proses pelaksanaan kebijakan, Sumberdaya yang dimaksud mencakup beberapa hal seperti, SDM, Anggarannya, Sarana dan Prasarana serta hal-hal lainnya.baik itu dari pihak dinasnya maupun dari pabrik karet itu sendiri, karena jika hanya pembuat kewenangan atau dinas saja yang menjalankan fungsinya, tetapi pemilik pabrik karet tidak memiliki sumber daya yang professional, maka kebijakan tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Maka sangat dibutuhkan saling support sumber daya pemilik pabrik dan dinasnya. Pada sumber daya manusianya, yang dibutuhkan adalah kesadaran dari berbagai pihak yaitu pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam melindungi lingkungan dan kebersihan, dengan pihak yang beroperasi dan menghasilkan suatu yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik itu kerusakan alam maupun kerusakan yang ada di lingkungan sekitarnya yaitu masyarakat.

Selain sumber daya manusianya, juga dibutuhkan anggaran yang cukup dalam melakukan pelaksanaan kebijakan ini. Anggaran merupakan suatu bentuk penunjang dalam melakukan kegiatan, karena jika sumber daya dari pihak dinas sudah baik tetapi anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut kurang, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat

dan hasilnya pun kurang baik, keduanya tentunya memiliki kaitan dimana satu dengan yang lainnya, tentunya tidak bisa dipisahkan. Anggaran yang diberikan adalah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan maksimal, adanya kebijakan maka juga harus ada anggaran yang menjadi penggerak kebijakan.

Fasilitas yang memadai juga menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pihak dinas. Untuk mengetahui dari proses penelitian yg telah selesai dilaksanakan oleh penulis, yaitu tentang indikator ke dua *Resources* (sumber daya) yang berkaitan dengan penelitian dengan judul Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Getah Karet Di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga hasil analisis pada pembahasan di bawah ini:

**Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator *Resources* (Sumber Daya).**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	TidakTerlaksana	
1	Sumber daya manusia (pegawai) yang mampu melakukan fungsi pengawasan DLHK	10 (50%)	7 (35%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Sumber daya anggaran untuk menjalankan kebijakan dari DLHK	2 (10%)	13 (65%)	5 (25%)	20 (100%)

<b>3</b>	Anggaran dalam melakukan pengawasan di lapangan	17 (85%)	2 (10%)	1 (5%)	20 (100%)
<b>4</b>	Ketersediaan anggaran mempengaruhi pengawasan di lapangan	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>80</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>60%</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>Seratus</b>

*Olahan Penulis Ditahun 2018*

Hasil penyajian data pada pembahasan data-data di atas mendapatkan kesimpulan yang menyatakan jawaban yang paling dominan terhadap indikator keduanya membahas tentang “*Resource*” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 12 Orang responden dengan persentase (60%), lalu di ikuti dengan jawaban responden peserta pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 6 Orang responden peserta dengan persentase (30%) sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Tidak Terlaksana” rata-rata 2 orang responden dengan persentase (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden.

Melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis dengan malakukan observasi dan juga wawancara dengan perwakilan dari Pemerintah Pekanbaru yaitu Dinas DLHK Pekanbaru, dan adapun hasil yang penulis dapatkan dari wawancara tersebut adalah pernyataan atau jawaban sebagai berikut:

*“Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah cukup untuk melakukan kegiatan dibidang pengawasan terkait dengan limbah karet di Kota Pekanbaru, hal-hal yang menjadi kendala pada saat ini yang dihadapi adalah proses penyusunan program, dimana kita baru melakukan penyesuaian terhadap satuan kerja Dinas, dan susunan organisasi dinas juga dalam proses pembentukan, sehingga program-program yang di akan hendak di jalankan atau di susun belum dapat terlaksana dengan maksimal” (Wawancara Tanggal 20 September 2018, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru).*

Terkait dengan ketersediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru memberikan penjelasannya sebagaimana berikut ini:

*“Anggaran untuk melakukan proses pengawasan tentunya kita tersedia, dan proses sosialisasi juga memiliki anggaran yang dapat di alokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti yang saya jelaskan di atas, hal ini belum berjalan dengan maksimal karna kita masih menyusun segala sesuatunya dengan baik agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan program khususnya di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan, dan proses ini akan kita jalankan seluruhnya pada tahun 2018 ini, sebanyak 60% program yang kita rencanakan sudah berjalan dengan cukup baik, memang ada keterlambatan khususnya di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran udara di pabrik karet, tetapi kita akan upayakan keseluruhan kegiatan tersebut akan rampung sampai akhir tahun ini”.* (Wawancara Tanggal 20 September 2018, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru).

Pembahasan seterusnya adalah penyajian dari wawancara terhadap informan dimana telah penulis laksanakan terhadap perwakilan dari perusahaan tempat penulis meneliti, dimana hasil wawancara yang dilakukan ataupun tanggapan yang diberikan oleh perwakilan perusahaan yaitu Bapak Yuliarman adalah sebagai berikut:

*“Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru saya kurang mengetahuinya secara pasti, tentunya mereka mempunyai standar untuk hal tersebut, yang pasti untuk pelaksanaan pengolahan limbah di Pabrik PT. P&P Bangkinang kita sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam mengelola*

*limbah tersebut, adapun beberapa limbah yang di hasilkan dalam proses pengolahan getah karet di pabrik ini adalah seperti limbah Cair, dimana limbah cair ini akan di buang kesungai setelah mengalami atau melalui proses penyaringan terlebih dahulu, jadi tidak dibuang secara mentah, harus di sterilkan terlebih dahulu”.* (Wawancara Tanggal 24 September 2018, Bapak Yiliarman, Wakil Bidang Manajemen PT. P&P Bangkinang)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas pembaca bisa melihat dimana dalam menjalankan atau melaksanakan suatu tupoksi harus memiliki SDM yang mumpuni serta menyeluruh dari setiap komponen. Sumber daya manusia atau pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dapat dinilai cukup baik, dikatakan cukup baik karena pasti ada manusia yang memiliki sisi kekurangan dan kelebihannya. Di dalam melaksanakan fungsinya dalam melindungi lingkungan, maka pihak Dinas pastinya memiliki standar operasionalnya, agar fungsi tersebut dalam dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Walaupun sudah ada Standar Operasional Prosedurnya tentunya pasti ada human error dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Dan berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa ketersediaan SDM Manusianyadimiliki atau ada pada Dinas DLHK Pekanbaru memang telah cukup untuk melakukan pengawasan dan proses pelaksanaan program terkait dengan Pengendalian Limbah Pabrik Karet yang ada di kota Pekanbaru, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum disusunnya pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan terkait dengan proses pengawasan dan pengendalian tersebut.

### **3. Disposition**

Disposition diartikan sebagai salah satu sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, dimana dikatakan apabila sipembuat kebijakan memiliki sebuah sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakannya, maka tentunya hasil yang di dapat juga akan sesuai dengan keinginan dari proses kebijakan tersebut, begitu juga dengan hasil sebaliknya.

Pemberi dan penerima kebijakan harus memiliki sikap saling respon. Respon yang baik terhadap kebijakan yang diberikan, dan dinas juga harus memberikan respon cepat tanggap dengan permasalahan apa yang terjadi di lapangan. Kesesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan keadaan di lapangan sangat diperlukan. Karena kebijakan itu di buat untuk kebaikan bagi pemilik pabrik dan juga masyarakat yang ada disekitar pabrik.

Salah satu penyebab pemilik pabrik tidak mengindahkan peraturan yang ada, karena bisa jadi sikap dari pihak dinas kurang tanggap dengan permasalahan di lapangan. Di dalam hal ini diperlukannya komitmen dari pihak DLHK untuk melakukan pengkajian ulang terhadap pencemaran lingkungan serta komitmen DLHK untuk melakukan pengawasan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrik karet.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ketiga yaitu tentang *disposition* maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dari proses penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis beserta hasil penelitian yang penulis dapatkan dari proses pengumpulan hasil wawancara yang dilakukan

terhadap perwakilan masing-masing dari Pemerintah Pekanbaru yaitu DLHK Pekanbaru serta perwakilan dari pihak Manajemen Perusahaan Pabrik Karetyang terletak pada kawasan yaitu Tangkerang Tengah Kec.Marpotan, maka penulis akan menyajikannya dalam pada pembahasan di bawah ini:

**Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator *Disposition***

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	TidakTerlaksana	
1	Komitmen DLHK untuk melakukan kajian tentang pencemaran lingkungan	0 (0%)	15 (75%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Komitmen DLHK untuk melakukan pengawasan terkait dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrik karet	0 (0%)	3 (15%)	17 (85%)	20 (100%)
3	Usaha DLHK lain untuk memperbaiki pencemaran lingkungan hidup	0 (0%)	8 (40%)	12 (60%)	20 (100%)

<b>4</b>	Melakukan sidak secara langsung	2 (10%)	6 (30%)	12 (60%)	20 (100%)
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>80</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
	<b>Persentase</b>	<b>5%</b>	<b>40%</b>	<b>55%</b>	<b>Seratus</b>

*Olahan Saya Pada 2018 Silam.*

Sesuai dengan data yang telah disajikan oleh penulis diatas hasil yang paling dominan terhadap indikator ketigayang membahas tentang “*disposision*” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Tidak Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 11 Orang responden dengan persentase (55%), lalu di ikuti dengan jawaban responden peserta pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 8 Orang responden peserta dengan persentase (40%) sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Terlaksana” rata-rata 1 orang responden dengan persentase (5%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden.

Berkaitan dengan pelaksanaan kajian tentang pencemaran lingkungan seperti yang di bahas pada hasil penelitian di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan pihak Pemerintah Pekanbaru yaitu DLHK Pekanbaru sebagai jawaban tambahan dimana sekaligus jawaban kunci dari kenyataan yang sebenarnya terjadi dilapangan, dan perwakilan dari pihak Dinas DLHK yang berhasil penulis wawancarai adalah Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut ini:

*“Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, proses penyusunan program yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dan juga bidang pencemaran lingkungan khususnya di daerah rawan seperti pabrik karet sudah kita programkan, akan tetapi sampai bulan ini belum dapat dilaksanakan karna jadwal pelaksanaannya belum di tetapkan, tetapi segala program yang telah di susun akan kita laksanakan paling lama sampai akhir tahun ini”.* (Wawancara Tanggal 20 September 2018, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru).

Melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pihak Perusahaan Perusahaan Pabrik Karet yang berlokasi di sekitar Kec.Marpoyan, dan adapun pernyataan yang disampaikan oleh bapak Yuliarman selaku Wakil Bidang Manajemen PT.P&P Bangkinang adalah sebagai berikut:

*“Perusahaan PT. P&P Bangkinang memiliki komitmen yang sangat jelas dalam pengendalian limbah pabrik yang dihasilkan, proses pengendalian dan komitmen yang dilakukan juga sangat jelas, saya dapat menjelaskan bahwa limbah yang dihasilkan dalam proses produksi ada beberapa macam, di mana diantaranya adalah Limbah Cair, Limbah Padat, dan Limbah B3, dimana masing-masing jenis limbah tersebut memiliki cara penanganannya tersendiri, salah satunya adalah limbah cair, proses pembuangan limbah cair dilakukan dengan cara mengalirkannya ke sungai, selanjutnya proses tersebut harus terlebih dahulu melalui penyaringan untuk mensterilkan limbah, selanjutnya limbah padat di sini dapat berbentuk seperti Kayu dan Pasir, limbah ini di olah lagi menjadi pupuk alami yang dapat di manfaatkan untuk kembali ke alam tanpa merusak ekosistem, dan yang terakhir adalah limbah B3, jenis limbah ini dapat berbentuk Gomok Mesin dan Oli Mesin, limbah jenis ini nantinya akan ada perusahaan yang menanganinya, perusahaan PT. P&P Bangkinang melakukan kerja sama dengan PT. Mitra Jaya Pertiwi untuk mengolah limbah tersebut”.* (Wawancara Tanggal 24 September 2018, Bapak Yuliarman, Wakil Bidang Manajemen PT. P&P Bangkinang)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis memang menemukan fakta bahwa proses pelaksanaan penanganan limbah yang dilakukan oleh PT. P&P Bangkinang sudah melalui tahapan-tahapan yang mana hal tersebut telah di atur dalam peraturan daerah, dan pihak Pemerintah seperti

DLHK Pekanbaru juga melakukan atau membentuk program-program yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru, akan tetapi pelaksanaannya memang belum sepenuhnya terlaksana karena sedang dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan. Yang menjadi kelemahan dalam menanggulangi limbah pabrik ini adalah kurang sigapnya dari pemerintahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk melakukan tindakan, yang dimulai dari penyusunan jadwal dalam melakukan pengawasan pada pabrik, sehingga pelaksanaan pengawasan terkendala dan pencemaran udara dan lingkungan sekitarnya sudah menjadi persoalan yang bisa dikatakan berbahaya khususnya dari segi kesehatan bagi masyarakat sekitar pabrik.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan indikator yang ke 4 (empat) yaitu proses Bureaucratic Structure atau Struktur Birokrasi.

#### **4. Bureaucratic Struktur**

Susunan dari sebuah struktur organisasi tentunya mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah disusun oleh organisasi tersebut, dimana hal ini mencakup 2 kaitan, yang mana diantaranya adalah mekanisme dan susunan struktur organisasi itu sendiri. Struktur organisasi ini dibuat agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pembagian tugas dan wewenangnya, diharapkan jika sudah adanya struktur organisasi maka tupoksi dari Dinas DLHK Kota Pekanbaru bisa dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam permasalahan keselamatan lingkungan dari limbah pabrik yang dihasilkan oleh PT. P&P. Karena permasalahan ini sudah cukup lama dibiarkan dan seolah-olah diabaikan oleh pemerintah

khususnya Kota Pekanbaru yang diamanhkan kepada DLHK Pekanbaru. Hal ini beralasan terkendala dari penyusunan jadwal dalam melakukan pengawasan, seharusnya jika sudah ada struktur organisasi, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bisa kerja lebih fokus dan bergerak cepat dalam melaksanakan tugasnya jika ada suatu gejala yang tidak sesuai peraturan dan prosedurnya.

Penulis akan menyajikan hasil penyebaran kuesioner dan analisisnya pada pembahasan di bawah ini, dan hasil tersebut telah di susun pada pemaparan dan analisis penyajian hasil yaitu:

**Tab 5.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator *Bereaucratic Structure***

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Memiliki unit kerja yang menangani masalah dibidang pencemaran di lingkungan dari pabrik karet	4 (20%)	16 (80%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pemberian sanksi kepada pabrik karet	4 (20%)	16 (80%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Meminta pendapat masyarakat atas pemberian sanksi kepada pabrik karet	0 (0%)	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)

4	Pemberian kontribusi kepada masyarakat	2 (10%)	6 (30%)	12 (60%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>80</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>55%</b>	<b>35%</b>	<b>Seratus</b>

*Sumb: Olahan Penulis 2018*

Didasari atas penjelasan diatas dapat di lihat jawaban diberikan paling dominan terhadap indikator keempat yang membahas tentang “Bureaucratic Structure” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 11 Orang responden dengan persentase (55%), lalu di ikuti dengan jawaban responden peserta pada kategori “Tidak Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 7 Orang responden peserta dengan persentase (35%) sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Terlaksana” rata-rata 2 orang responden dengan persentase (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari pihak-pihak terkait yang relevan untuk memberikan penjelasan dan data terkait dengan penelitian penulis, dimana informan yang penulis tetapkan adalah perwakilan dari pihak Dinas DLHK Kota Pekanbaru, selanjutnya adalah Perwakilan yang berasal dari Perusahaan PT. P&P Bangkinang, adapun tanggapan hasil wawancara yang pertama yang berhasil penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

*“Unit kerja yang menangani bidang pencemaran lingkungan dan juga pengendalian lingkungan tentunya ada, saya sendiri adalah bagian dari*

*unit kerja tersebut, dan bidang-bidang khusus adalah Bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Beracun Dan Berbahaya, Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya, dan Bahan Beracun. Semua unit tersebut adalah unit yang menangani bidang-bidang terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Pekanbaru”. (Wawancara Tanggal 20 September 2018, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru).*

Sementara itu untuk pernyataan yang diberikan oleh pihak Dinas DLHK Kota Pekanbaru terkait dengan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan terkait dengan pencemaran lingkungan, perwakilan Dinas DLHK memberikan penjelasannya sebagai berikut:

*“Untuk sanksi yang diberikan itu pelaksanaannya tentu ada, tetapi kan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, butuh diteliti dan diselidiki dulu sebelum memberikan sanksi tersebut, dan jenis-jenis sanksi juga memiliki tahapan-tahapannya, mulai dari sanksi administrasi, peringatan tertulis, peringatan keras, sampai dengan pencabutan izin operasional tempat usaha mereka”. (Wawancara Tanggal 20 September 2018, Bapak R.Adrian selaku Bidang Staff Hukum Dan Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru).*

Dalam pengumpulan data yang penulis lakukan, tentunya dibutuhkan jawaban yang seimbang untuk mengetahui proses atau pelaksanaan kegiatan yang terjadi dilapangan, dan penulis juga telah melakukan sesi wawancara dengan informan penulis yaitu perwakilan dari pihak PT. P&P Bangkinang yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

*“Perusahaan kita belum pernah diberikan sanksi oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, karna sebagaimana yang terjadi kita selalu mematuhi aturan-aturan yang di tetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru, dan upaya-upaya yang kita laksanakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga telah nyata bentuknya, selain dari pada hal tersebut, perusahaan PT. P&P Bangkinang juga rutin membangikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat, perusahaan kita aktif mengikuti perkembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik ini beroperasi, saya rasa sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan saksi dari pihak*

*Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.* (Wawancara Tanggal 24 September 2018, Bapak Yiliarman, Wakil Bidang Manajemen PT. P&P Bangkinang)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis paparkan di atas bahwa, struktur organisasi pada pihak Dinas DLHK Pekanbaru sudah dibentuk dan menjalankan fungsinya sesuai terhadap masing-masing bidang yang ditetapkan. Tetapi memang tinggal menjalankan pelaksanaannya untuk menerapkan fungsi dan kewenangannya untuk memberikan sanksi dengan tegas kepada pihak Perusahaan pabrik yang berada di areal atau kawasan masyarakat yang tidak bisa mengendalikan pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis dapatkan dilapangan, penulis memang menemukan fakta bahwa pelaksanaan pembentukan tim atau bidang khusus pada Dinas DLHK & Kebersihan di Kota Pekanbaru memang sudah terlaksana dan di susun dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bukti struktur organisasi yang di buat oleh Dinas tersebut, dan pihak Perusahaan PT. P&P Bangkinang juga telah melakukan kewajiban atau usaha-usaha mereka dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan juga ikut berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik beroperasi.

### **C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Yang Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.**

Adapun hasil rekapitulasi pada penelitian ini adalah untuk menyimpulkan keseluruhan jawaban yang telah di dapatkan dari penyebaran kuesioner penulis kepada responden masyarakat, dimana hasil kuesionernya yaitu:

**Tbel V8: Total Dari Hasil Akhir Tanggapan Responden Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik**

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	<i>Communication</i>	4 (20%)	10 (50%)	6 (30%)	20 (100%)
2	<i>Resources</i>	12 (60%)	6 (30%)	2 (10%)	20 (100%)
3	<i>Disposision</i>	1 (5%)	8 (40%)	11 (55%)	20 (100%)
4	<i>Bereaucratic Structure</i>	2 (10%)	11 (55%)	7 (35%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>80</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>45%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018*

Berdasarkan data pada tabel V.8 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden masyarakat dari keseluruhan sampel yang ada pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “*Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Disposision* (Disposisi), *Bereaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)” ”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet pada kategori jawaban “Cukup Terlaksana” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah rata-rata responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 9 atau jika di presentasikan yang mencapai jumlah 45% persen dan hasil tersebut adalah

dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden masyarakat yang ada di sekitar pabrik.

**D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dengan Judul Tentang Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet**

Dalam menjalankan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dari peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebersihan kota tentunya memiliki hambatan-hambatan dalam prosesnya terutama yang berkaitan dengan proses penanggulangan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh Perusahaan Pabrik Karet di Kota Pekanbaru, adapun Faktor-Faktor Penghambat yang di alami oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Pada Indikator *Communication* (Komunikasi)
  - a. Pelaksanaan sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh jadwal kegiatan yang memang belum di bentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
  - b. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat di akibatkan karena masyarakat tidak ada yang memberikan laporan terkait dengan kondisi dilapangan, dan apakah memang terjadi masalah yang di akibatkan oleh perusahaan pabrik karet di daerah tempat mereka tinggal.
2. *Resources* (Sumber Daya)

- a. Salah satu hambatan yang di alami pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota adalah belum lengkapnya pembentukan struktur tugas pada bidang-bidangnya masing-masing, dan belum di susunnya jadwal pelaksanaan program sehingga sumber daya manusia yang tersedia tidak dapat bekerja secara maksimal.
- b. Kurangnya koordinasi antara pengurus lama Dinas Lingkungan Hidup dengan pengurus atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada saat ini, sehingga data-data yang diketahui cukup terbatas.

3. *Disposition* (Disposisi)

- a. Lama nya proses penyusunan program dan juga jadwal pelaksanaan dan pembentukan tim kerja menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

4. *Bureucratic Struckture* (Struktur Birokrasi)

- a. Berkaitan dengan belum terbentuknya jadwal pengawasan terhadap pabrik karet yang ada di kota Pekanbaru, tentunya tim khusus yang di tugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga belum dilakukan pembentukan. hal ini tentunya berdampak belum berjalannya proses pengawasan dan pemberian saksi yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan *key informan* dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisisioner dan data sekunder di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru maupun di kantor PT. P&P

Bangkinang. Sehingga dari jawaban keseluruhan yang penulis dapatkan dari oalahan data dan observasi dilapangan, penulis menemukan jawaban untuk penelitian ini dengan jawaban “Cukup Terlaksana”. dimana jawaban ini di dapatkan dari total rata-rata keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 9 responden atau jika di presentasikan yang mencapai jumlah 45% persen dari 20 masyarakat yang di jadikan responden.

Jawaban ini tentunya memiliki alasan, dimana hal ini dikarenakan beberapa aspek yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait yang relevan. Dengan demikian maka penulis akan memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, dan penulis berharap dengan adanya masukan ini nantinya dapat membantu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat operational Pabrik.

Dan adapun faktor penghambat yang dialami oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Pada Indikator *Communication* (Komunikasi)
  - a. Pelaksanaan sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh jadwal kegiatan yang memang belum di bentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
  - b. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat di akibatkan karena masyarakat tidak ada yang memberikan laporan terkait dengan kondisi dilapangan, dan apakah

memang terjadi masalah yang di akibatkan oleh perusahaan pabrik karet di daerah tempat mereka tinggal.

2. *Resources* (Sumber Daya)

- a. Salah satu hambatan yang di alami pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota adalah belum lengkapnya pembentukan struktur tugas pada bidang-bidangnya masing-masing, dan belum di susunnya jadwal pelaksanaan program sehingga sumber daya manusia yang tersedia tidak dapat bekerja secara maksimal.
- b. Kurangnya koordinasi antara pengurus lama Dinas Lingkungan Hidup dengan pengurus atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3. *Disposition* (Disposisi)

Lama nya proses penyusunan program dan juga jadwal pelaksanaan dan pembentukan tim kerja menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

4. *Bureucratic Struckture* (Struktur Birokrasi)

Berkaitan dengan belum terbentuknya jadwal pengawasan terhadap pabrik karet yang ada di kota Pekanbaru, tentunya tim khusus yang di tugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga belum dilakukan pembentukan. hal ini tentunya berdampak belum berjalannya proses pengawasan dan pemberian saksi yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah di sajikan pada pembahasan bab –bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet di Kota Pekanbaru. Adapun saran penulis untuk tujuan yang telah di buat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Saran untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah agar melaksanakan dan menetapkan jadwal pengawasan secepat mungkin, hal ini bertujuan agar pengendalian pencemaran limbah yang mengakibatkan polusi udara disekitar pabrik karet PT. P&P Bangkinang dapat berkurang.
- b. Penulis menyarankan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar melaksanakan pengawasan tanpa menunggu laporan yang diberikan oleh masyarakat terlebih dahulu serta membentuk tim kerja yang dapat menjalankan tugas pengawasan di lapangan.
- c. Penulis menyarankan kepada pihak Perusahaan PT.P&P Bangkinang agar lebih memperhatikan lingkungan di sekitar pabrik beroperasi, karna limbah yang dihasilkan oleh operasional pabrik dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar pabrik.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40
- Brantas.(2009). *Dasar-dasar Manajemen*.Bandung : Alfabeta
- Dessler Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Edisi Kesepuluh Jilid Dua PT Indeks halaman 46
- Griffin. 2004. *Manajemen alih bahasa Gina Gania*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. Hani, 2009. *Manajemen Cetakan Dua Puluh*, Yogyakarta ; Penerbit BPEE
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Munaf Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Ndraha Taliziduhu, 1987. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta; Rineka Cipta
- Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta
- Ndraha Taliziduhu, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta
- Rasyid Muhammad Ryas, 1998. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta; Yarsif Watampone
- Rasyid Muhammad Ryas, 2007. *Memaknai Fungsi Pemerintahan, Cetakan VI*, Jakarta; Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya.
- Riplay dan Franklin dkk, 2008. *Kebijakan Publik*, Jakarta; Inter Media
- Ripley, Rendal B, And Grace A Franklin, 1998. *Policy Implementation and Beaureaucracy, Second Edition, The Dorsey Press*. Chicago; Illionis.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*, Bandung; Mandar Maju.
- Siagian, S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Silalahi Ulber, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi; Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Singarimbun, 1987. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta; Penerbit LP3ES.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryaningrat, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Rineka Cipta
- Syafei Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung; Mandar Maju
- Syafei Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung; PT. Fefika Aditama.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waab S.A, 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta; Bumi Aksara.

Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

**Dokumentasi :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Bab IV Pasal 18 ayat (1) - (7) Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Demokrasi dan tugas pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

<http://datariau.com/lingkungan/sekian-lama-beroperasi-di-pekanbaru-pabrik-karet-pt-ricry-tak-ada-kontribusi>

<https://www.goriau.com/berita/pekanbaru/jadi-biang-limbah-warga-kecewa-izin-pabrik-karet-pt-bangkinang-diperpanjang-pemko-pekanbaru.html>